

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Faktor geografis dan demografi Indonesia, dimana Indonesia memiliki wilayah luas yang terdiri dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia yang populasinya mencapai 250 juta jiwa (Finace.detik.com diakses 27 Februari 2015). Dengan kondisi tersebut, pembangunan secara merata diseluruh wilayah dan upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Hasil kekayaan alam yang dimiliki ternyata belum cukup mampu membiayai program tersebut, sehingga peranan pajak masih sangat diperlukan. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber alam yang melimpah, semua akan menjadi sia-sia jika tidak mampu dikelola dengan baik. Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi. Untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara.

Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara dapat dilihat pada Tabel 1.1 dimana setiap tahunnya penerimaan pajak terjadi peningkatan.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan Pajak	723.307	873.874	1.016.237	1.192.994	1.280.400
Penerimaan Bukan Pajak	268.942	331.472	341.143	332.196	385.400

Sumber : [www. Bps.go.id](http://www.Bps.go.id)

Berdasarkan data diatas dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 2010-2014 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan Penerimaan Pajak, yaitu pada tahun 2010 Rp 723.307 milyar, tahun 2011 Rp 873.874 milyar, tahun 2012 Rp1.016.237 milyar, tahun 2013 Rp 1.192.994 milyar dan tahun 2014 sebesar Rp. 1.280.400 milyar dan bila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak lebih besar nilainya. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Alokasi dana pajak selain untuk pembangunan juga untuk bidang-bidang lain, seperti, untuk infrastruktur negara, fasilitas umum, dan dana sosial negara yang dalam hal ini untuk membantu program-program pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di negara ini. Selain itu pajak juga dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. Jadi, bisa dikatakan pajak juga ikut berperan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana dari kabinet kerja di Kantor Kepresidenan, tanggal Kamis 30 Oktober 2014 menyoroti tentang penerimaan pajak negara yang sejak tahun 2005-2013 tidak pernah tercapai. Presiden juga mengatakan bahwa sebenarnya total Wajib Pajak ada 24 juta, tetapi yang menyampaikan SPT hanya 17 juta Wajib Pajak. Pesan Presiden bila tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan maka diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak akan dapat ditingkatkan lagi (www.viva.co.id diakses tanggal 9 November 2014). Pesan Presiden ini ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yang mencanangkan bahwa untuk tahun 2015 Pemerintah akan fokus untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan. (www.kemenkeu.go.id diakses 9 November 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya. Ketidakepatuhan Wajib Pajak dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan, hal ini dapat mencapai suatu titik dimana lumpuhnya sistem perpajakan. Selain Kepatuhan Wajib Pajak, Pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum, salah satunya berupa penagihan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya Wajib Pajak

terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga Wajib Pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo semakin meningkat dari tahun ke tahun (tabel 1.2) sehingga target penerimaan pajak dibuat semakin bertambah setiap tahunnya tetapi realisasi penerimaan pajak berbeda dengan Realisasinya karena selalu berada pada kisaran kurang dari 90%. (tabel 1.3). Kondisi ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan pajak (lihat tabel 1.4) yang rata-rata naik kurang dari 2% sejak tahun 2011 sampai dengan 2013, baru pada tahun 2014 ada kenaikan diatas rata-rata yaitu sebesar kurang dari 10 persen, sehingga bisa dikatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang

tidak melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Untuk mengatasi masalah tersebut maka harus dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011:169)

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama
Surabaya Wonocolo Tahun 2011-2014

Tahun	WPOP yang Terdaftar
2011	43.857
2012	61.985
2013	66.717
2014	70.745

Sumber : KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Tabel 1.3
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama
Surabaya Wonocolo Tahun 2011-2014

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4 = (3:2)
2011	888.693.641.230	797.782.923.747	89,77%
2012	910.869.808.247	1.002.307.866.204	110,04%
2013	1.401.057.811.139	1.158.076.093.694	82,66%
2014	1.510.541.241.563	1.290.928.534.131	85,46%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Tabel 1.4
Rasio Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Tahun 2011 – 2014

Uraian	2011	2012	2013	2014
WP	43295	54124	57063	49265
Effektif				
SPT Tahunan tepat waktu	22568	28538	30175	32267
Rasio Kepatuhan (%)	52,1	52,7	52,8	65,5

Sumber : KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo karena masih belum optimalnya peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak terhadap negara sehingga potensi peningkatan penerimaan Pajak masih terbuka luas. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo”**.

Penelitian tentang Perpajakan merupakan bagian dari pengembangan riset akuntansi disamping riset yang lain seperti bidang auditing, keuangan, manajerial dan sistem akuntansi Adapun pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan pertimbangan bahwa, pertama, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP tersebut memiliki jumlah yang paling banyak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Kedua, karena jumlah Wajib Pajak yang banyak maka Jumlah Penerimaan Pajaknya pun terbesar bila dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 (Lampiran 1)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?
- 2 Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?
- 3 Apakah kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara bersama- sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji :

- 1 Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.
- 2 Pengaruh penagihan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?
- 3 Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak secara bersama- sama terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Wajib Pajak
Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Wajib Pajak serta menjadi masukan agar Wajib Pajak dapat meningkatkan Penerimaan Pajak.
2. Manfaat bagi Pembaca
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
 - b. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

3. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

4. Manfaat bagi Penulis

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, Khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis, khususnya dalam hal kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang pemilihan judul yang menjelaskan bahwa idealnya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak akan berbanding lurus dengan besarnya penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan orang pribadi, tetapi realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Wonocolo setiap tahun sejak 2010-2014 rata-rata kurang dari 90%. Dan bila dilihat dari rasio kepatuhannya untuk tahun 2010 - 2014 rata-rata kenaikannya tidak signifikan berkisar antara kurang dari 2% sampai dengan 10% sehingga diperlukan upaya-upaya penagihan secara intensip agar dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut dibuatkan perumusan masalahnya Pada Bab 1 ini disajikan pula tentang Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Proposal.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 ini diuraikan tentang Landasan Teori tentang Dasar-dasar pengertian pajak, kepatuhan Wajib Pajak, penagihan pajak , pajak penghasilan dan Penerimaan Pajak. Pada sub bab berikutnya dijelaskan Penelitian Terdahulu, Hipotesis serta Kerangka Berpikir.

BAB 3. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dengan pendekatan penelitian Kuantitatif, Identifikasi Variabel terdiri dari dua variabel, yaitu Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Variabel Bebasnya adalah kepatuhan Wajib Pajak dan penagihan pajak. Sedangkan untuk Variabel Terikatnya adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Data yang digunakan data sekunder yang didapatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Sedangkan untuk Teknik Analisisnya menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini antara lain menguraikan tentang gambaran umum dari subyek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Selanjutnya adalah deskripsi hasil penelitian, analisis data, pengujian hipotesis serta pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian.

BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan kesimpulan mengenai pengaruh variabel kepatuhan Wajib Pajak (X1) dan penagihan pajak (X2) terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Selanjutnya dari kesimpulan yang ada dikemukakan saran-saran yang layak untuk dipertimbangkan.